

GAMBARAN INFLASI INDONESIA

— MEDIO 2026 —

TREN, FAKTOR, DAN PROSPEK
MENUJU STABILITAS HARGA



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

7 April 2026

GAMBARAN INFLASI INDONESIA MEDIO 2026

Abstrak

Makalah ini membahas gambaran inflasi Indonesia pada medio 2026 dengan catatan metodologis penting: hingga awal April 2026, data inflasi resmi yang telah dipublikasikan Badan Pusat Statistik baru tersedia sampai Maret 2026. Karena itu, istilah “medio 2026” dalam makalah ini dibaca sebagai potret inflasi Indonesia memasuki pertengahan tahun, yaitu berdasarkan realisasi akhir 2025, perkembangan Januari–Maret 2026, serta proyeksi dan asesmen resmi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan IMF untuk sisa tahun berjalan. Temuan utama makalah ini adalah bahwa inflasi Indonesia pada awal 2026 tidak menunjukkan gejala inflasi yang lepas kendali, melainkan mengalami normalisasi dengan satu lonjakan sementara pada Februari 2026. Setelah inflasi 2025 ditutup pada 2,92 persen, inflasi tahunan naik menjadi 3,55 persen pada Januari 2026, melonjak ke 4,76 persen pada Februari 2026, lalu turun kembali ke 3,48 persen pada Maret 2026. Lonjakan Februari terutama dipengaruhi *low base effect* dari diskon tarif listrik 50 persen pada awal 2025, di samping tekanan musiman pangan dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Struktur inflasi awal 2026 memperlihatkan tiga pola: inflasi inti relatif terkendali di kisaran 2,45–2,63 persen, inflasi *volatile food* bergerak naik karena cuaca dan musiman, sedangkan inflasi *administered prices* menjadi sumber distorsi statistik paling besar akibat efek basis. Dengan demikian, tantangan utama inflasi Indonesia medio 2026 bukan semata-mata tekanan permintaan agregat, tetapi kombinasi antara dinamika pangan, harga yang diatur pemerintah, nilai tukar, harga komoditas global, dan faktor musiman. Bank Indonesia tetap mempertahankan BI-Rate pada 4,75 persen pada Maret 2026 dan menilai inflasi 2026–2027 tetap berada dalam

kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen, meskipun lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya karena prospek harga komoditas global meningkat. Makalah ini menyimpulkan bahwa inflasi Indonesia medio 2026 secara umum masih terjaga, tetapi kualitas pengendaliannya sangat bergantung pada efektivitas koordinasi moneter-fiskal, stabilisasi pangan, pengelolaan ekspektasi inflasi, serta ketahanan logistik dan distribusi antarwilayah. ([Bank Indonesia](#))

Kata kunci: *inflasi Indonesia, inflasi 2026, Bank Indonesia, volatile food, administered prices, inflasi inti, kebijakan moneter, stabilisasi harga*

Gambaran Inflasi Indonesia Medio 2026

Pendahuluan

Inflasi selalu menjadi salah satu indikator makroekonomi yang paling sensitif secara ekonomi maupun politik. Bagi rumah tangga, inflasi menyentuh persoalan sehari-hari: harga beras, tarif transportasi, biaya sekolah, sewa rumah, dan ongkos energi. Bagi pemerintah, inflasi memengaruhi stabilitas sosial, daya beli, kemiskinan, dan kredibilitas kebijakan. Bagi bank sentral, inflasi merupakan inti dari mandat stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Karena itu, membaca gambaran inflasi Indonesia pada medio 2026 tidak cukup dilakukan dengan menyebut satu angka inflasi tahunan, melainkan harus melihat struktur pembentuknya, sumber tekanannya, pola bulanannya, serta respon kebijakan yang menyertainya. Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa stabilitas nilai rupiah mengandung dua aspek: kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin pada inflasi, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada nilai tukar. BI juga menjelaskan bahwa inflasi Indonesia banyak dipengaruhi faktor penawaran dan kejutan,

terutama pada kelompok *volatile food* dan *administered prices*, yang bersama-sama mencakup sekitar 40 persen bobot IHK. ([Bank Indonesia](#))

Dalam konteks itu, inflasi Indonesia pada awal 2026 menarik karena memperlihatkan kombinasi antara kestabilan jangka menengah dan volatilitas jangka pendek. Di satu sisi, inflasi 2024 tercatat 1,57 persen dan inflasi 2025 sebesar 2,92 persen, yang keduanya masih berada dalam sasaran inflasi $2,5 \pm 1$ persen untuk 2025–2027. Di sisi lain, awal 2026 menghadirkan dinamika yang lebih tajam: Januari 2026 sebesar 3,55 persen, Februari 2026 sebesar 4,76 persen, lalu Maret 2026 turun menjadi 3,48 persen. Data ini segera menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia sedang memasuki fase inflasi yang mengkhawatirkan, ataukah ini hanya gejolak temporer yang disebabkan efek basis dan pola musiman? ([Bank Indonesia](#))

Makalah ini berangkat dari argumen bahwa gambaran inflasi Indonesia medio 2026 harus dibaca secara hati-hati. Kenaikan inflasi pada Februari 2026 memang menembus batas atas sasaran BI, tetapi sumber tekanannya terutama bersifat sementara, khususnya *low base effect* akibat diskon tarif listrik rumah tangga pada Januari–Februari 2025, serta kenaikan permintaan pangan menjelang Ramadan. Karena itu, analisis inflasi 2026 perlu membedakan antara tekanan struktural dan tekanan temporer. Jika perbedaan ini diabaikan, pembacaan kebijakan bisa menjadi keliru: gejala statistik jangka pendek disalahartikan sebagai overheating ekonomi, atau sebaliknya tekanan inflasi yang nyata dianggap sekadar fenomena musiman. ([Bank Indonesia](#))

Secara metodologis, makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis sumber resmi. Data dan interpretasi utama diambil dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan IMF. Pilihan ini penting karena pembahasan mengenai inflasi sangat mudah bias bila hanya bergantung pada opini pasar atau komentar sekunder. Dengan basis tersebut, makalah ini menyusun narasi utuh mengenai inflasi Indonesia sampai Maret 2026 dan mengembangkan pembacaan prospektif

menuju pertengahan tahun. Jadi, makalah ini tidak mengklaim memiliki data Juni 2026, melainkan menyajikan “gambaran medio 2026” sebagai potret memasuki pertengahan tahun berdasarkan data yang telah tersedia dan proyeksi resmi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi sebagai Fenomena Makroekonomi di Indonesia

Dalam teori makroekonomi, inflasi dapat muncul dari sisi permintaan, sisi penawaran, ekspektasi, nilai tukar, maupun kebijakan harga yang diatur pemerintah. Namun, Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Menurut Bank Indonesia, kebijakan moneter terutama ditujukan untuk mengelola tekanan harga dari sisi permintaan agregat, sedangkan inflasi yang berasal dari kejutan penawaran—seperti kenaikan harga minyak dunia, gangguan panen, banjir, atau gangguan distribusi—membutuhkan koordinasi lebih luas antara BI dan pemerintah. Karena itu, pengendalian inflasi Indonesia tidak pernah murni merupakan urusan suku bunga. Ia selalu terkait dengan pangan, logistik, energi, transportasi, komunikasi kebijakan, dan koordinasi pusat-daerah. ([Bank Indonesia](#))

Kerangka resmi inflasi Indonesia juga membedakan tiga komponen utama. Pertama, inflasi inti, yaitu inflasi yang cenderung lebih mencerminkan tekanan fundamental dan ekspektasi jangka menengah. Kedua, inflasi *volatile food*, yaitu kelompok harga pangan bergejolak yang sangat sensitif terhadap musim, panen, cuaca, dan distribusi. Ketiga, inflasi *administered prices*, yakni harga-harga yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, seperti tarif listrik, harga BBM tertentu, dan tarif transportasi. Pembagian ini sangat penting untuk membaca awal 2026, sebab lonjakan inflasi Februari tidak berasal dari satu sumber tunggal. Ia lahir dari kombinasi efek basis pada *administered prices*, tekanan pangan pada *volatile food*, dan kenaikan terbatas pada inflasi inti. ([Bank Indonesia](#))

Di atas kerangka itu, sasaran inflasi 2025–2027 ditetapkan pemerintah sebesar 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Artinya, rentang toleransi operasional berada pada 1,5 sampai 3,5 persen. Dari sudut pandang kebijakan, sasaran ini memberi jangkar ekspektasi: rumah tangga, pelaku

usaha, dan pasar keuangan memperoleh sinyal mengenai tingkat inflasi yang dianggap konsisten dengan stabilitas. Keberhasilan inflasi 2024 sebesar 1,57 persen dan 2025 sebesar 2,92 persen menunjukkan bahwa Indonesia memasuki 2026 dari titik awal yang relatif terkendali. Karena itu, lonjakan awal 2026 harus dibaca sebagai penyimpangan sementara dari tren stabilisasi yang lebih luas, bukan sebagai kerusakan total pada mekanisme pengendalian inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Posisi Inflasi Indonesia Menjelang Medio 2026

Bila disusun secara kronologis, pola inflasi Indonesia dari akhir 2025 ke awal 2026 menunjukkan perubahan yang tajam tetapi tidak linear. Inflasi tahunan Desember 2025 tercatat 2,92 persen. Memasuki Januari 2026, inflasi tahunan naik menjadi 3,55 persen dengan IHK 109,75, sementara secara bulanan justru terjadi deflasi 0,15 persen. Pada Februari 2026, inflasi tahunan melonjak ke 4,76 persen dengan IHK 110,50 dan inflasi bulanan 0,68 persen. Lalu pada Maret 2026, inflasi tahunan menurun kembali menjadi 3,48 persen dengan IHK 110,95 dan inflasi bulanan 0,41 persen. Secara *year to date*, inflasi sampai Maret 2026 tercatat 0,94 persen. Rangkaian ini menunjukkan bahwa cerita inflasi awal 2026 tidak sederhana: ada kenaikan tahunan yang tajam, tetapi juga ada tanda moderasi segera setelah puncak Februari. ([Bank Indonesia](#))

Angka-angka tersebut juga lebih mudah dipahami bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi Januari 2026 lebih tinggi dari Desember 2025, tetapi Januari 2026 secara bulanan malah mengalami deflasi. Kenaikan tahunan Januari bukan karena ledakan harga pada bulan itu, melainkan karena perubahan basis perbandingan. Hal yang sama lebih kuat lagi pada Februari 2026. Bank Indonesia secara tegas menyebut bahwa inflasi Februari 2026 yang berada di atas sasaran lebih dipengaruhi *low base effect* Februari 2025 yang sangat rendah, terutama karena kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga 50 persen pada Januari–Februari 2025. Di sini tampak satu pelajaran metodologis penting: angka *year-on-year* dapat melonjak sekalipun tekanan harga saat ini tidak sepenuhnya

berasal dari lonjakan harga baru, melainkan dari basis pembanding yang tidak biasa rendah. ([Bank Indonesia](#))

Dari perspektif stabilitas, Maret 2026 menjadi bulan yang sangat penting. Setelah Februari melonjak ke 4,76 persen dan menembus batas atas sasaran, Maret turun ke 3,48 persen, kembali masuk ke dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Bank Indonesia menyatakan inflasi IHK Maret 2026 tetap terjaga, dan menilai perkembangan itu sebagai hasil dari konsistensi kebijakan moneter, sinergi pengendalian inflasi pusat-daerah, dan penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional. Secara kebijakan, ini berarti otoritas memandang spike Februari lebih sebagai gangguan sementara daripada perubahan rezim inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Bila membaca inflasi awal 2026 dari sudut tren, maka gambaran medio 2026 tampak sebagai berikut. Pertama, Indonesia tidak sedang berada pada situasi inflasi rendah ekstrem seperti 2024. Kedua, Indonesia juga tidak sedang kembali ke episode inflasi tinggi seperti 2022. Ketiga, Indonesia sedang berada dalam fase normalisasi menuju kisaran sasaran, tetapi jalurnya tidak mulus karena dipengaruhi efek basis, musim hari besar keagamaan, dan harga pangan. Dengan demikian, potret inflasi medio 2026 lebih tepat disebut sebagai inflasi yang "terjaga tetapi sensitif", bukan inflasi yang "jinak sepenuhnya" atau "membahayakan secara sistemik". ([Bank Indonesia](#))

Dinamika Inflasi Inti: Terkendali, tetapi Perlu Dibaca Cermat

Salah satu temuan terpenting dari awal 2026 adalah relatif terkendalinya inflasi inti. Pada Januari 2026, inflasi inti tahunan tercatat 2,45 persen, naik tipis dari 2,38 persen pada Desember 2025. Pada Februari 2026, inflasi inti naik menjadi 2,63 persen. Lalu pada Maret 2026, inflasi inti turun kembali ke 2,52 persen. Secara bulanan, inflasi inti tercatat 0,37 persen pada Januari, 0,42 persen pada Februari, dan 0,13 persen pada Maret. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan inti memang ada, tetapi tidak meledak. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti kuat bahwa perekonomian Indonesia

pada awal 2026 mengalami kelebihan permintaan yang ekstrem. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Faktor yang mendorong inflasi inti juga menarik. Pada Januari 2026, BI menyebut inflasi inti dipengaruhi terutama oleh kenaikan harga emas global, dengan komoditas penyumbang utama berupa emas perhiasan, sewa rumah, dan sepeda motor. Pada Februari, inflasi inti masih meningkat. Pada Maret, inflasi inti justru melandai karena penurunan harga emas global dan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, meskipun permintaan naik pada periode Idulfitri. Narasi ini menunjukkan bahwa inflasi inti Indonesia pada awal 2026 tidak didorong terutama oleh upah atau permintaan konsumsi massal yang berlebihan, melainkan oleh kombinasi penyesuaian harga terbatas dan pergerakan komoditas tertentu, terutama emas. ([Bank Indonesia](#))

Di sinilah kehati-hatian analitis diperlukan. Banyak pembaca awam melihat angka inflasi 4,76 persen pada Februari lalu segera menyimpulkan bahwa seluruh harga sedang melonjak. Padahal, komponen inti—yang lebih sering dipakai untuk membaca tekanan inflasi fundamental—tetap berada di kisaran dua persen. Hal ini sejalan dengan pandangan BI bahwa inflasi inti diperkirakan tetap rendah karena ekspektasi inflasi terjaga, kapasitas ekonomi masih memadai, dan *imported inflation* belum menjadi sumber tekanan besar. Dalam bahasa kebijakan, ini berarti inflasi awal 2026 lebih merupakan persoalan komposisi dan timing, bukan kegagalan total dalam mengelola permintaan agregat. ([Bank Indonesia](#))

Volatile Food: Jantung Kerentanan Inflasi Indonesia

Jika inflasi inti relatif stabil, maka *volatile food* justru memperlihatkan wajah paling khas dari inflasi Indonesia. Pada Januari 2026, kelompok ini mengalami deflasi bulanan 1,96 persen dan inflasi tahunan 1,14 persen, terutama karena pasokan cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah meningkat pada masa panen. Namun situasi berubah pada Februari. Inflasi *volatile food* secara tahunan naik menjadi 4,64 persen, dan secara bulanan mencapai 2,50 persen. Pada Maret, *volatile food* masih tinggi dengan inflasi

tahunan 4,24 persen dan inflasi bulanan 1,58 persen, disumbang terutama oleh daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras akibat peningkatan permintaan selama periode Idulfitri. Data ini menunjukkan bahwa inflasi pangan pada awal 2026 bersifat sangat dinamis: sempat rendah karena panen, lalu melonjak karena cuaca, distribusi, dan musiman konsumsi. ([Bank Indonesia](#))

Secara struktural, gejala ini konsisten dengan karakter inflasi Indonesia yang rentan terhadap gangguan penawaran. Bank Indonesia menjelaskan bahwa kelompok *volatile food* bersama *administered prices* mencakup kurang lebih 40 persen bobot IHK, sehingga perubahan harga pada pangan dapat menggerakkan inflasi umum secara signifikan. Itulah sebabnya kebijakan inflasi di Indonesia selalu terhubung dengan ketahanan pangan. Inflasi pangan bukan sekadar isu pertanian, tetapi juga isu logistik, perdagangan antarwilayah, cadangan pangan, irigasi, cuaca, akses pembiayaan produksi, sampai kelancaran distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit. ([Bank Indonesia](#))

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2026, pemerintah dan BI menegaskan lima langkah strategis, termasuk menjaga inflasi harga bergejolak dalam kisaran 3,0–5,0 persen, memperkuat pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, memperbaiki distribusi dan logistik pangan, serta memperkuat komunikasi ekspektasi inflasi. Bahkan, koordinasi ini dikaitkan dengan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, karena program semacam itu akan menaikkan permintaan terhadap komoditas pangan tertentu bila tidak diimbangi penguatan sisi penawaran. Ini menegaskan bahwa pembacaan inflasi medio 2026 harus memandang pangan sebagai arena paling menentukan. Selama pangan stabil, inflasi Indonesia cenderung terkendali. Ketika pangan terganggu, tekanan inflasi segera naik meskipun komponen inti relatif tenang. ([Bank Indonesia](#))

Narasi ini juga memiliki makna sosial yang besar. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, inflasi pangan jauh lebih terasa dibanding inflasi rata-rata nasional. Beras, telur, cabai, ayam, dan bawang adalah komoditas

dengan bobot psikologis dan sosial yang sangat tinggi. Karena itu, inflasi pangan yang “masih dalam kisaran terkendali” menurut agregat makro belum tentu terasa ringan di tingkat rumah tangga. Di sinilah kebijakan inflasi Indonesia selalu bersinggungan dengan perlindungan sosial, bantuan pangan, operasi pasar, dan stabilisasi distribusi. Pengendalian inflasi di Indonesia pada dasarnya juga merupakan pengendalian beban hidup masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

Administered Prices: Sumber Distorsi Statistik sekaligus Risiko Kebijakan

Kelompok *administered prices* adalah bagian yang paling menjelaskan lonjakan inflasi awal 2026. Pada Januari 2026, kelompok ini secara bulanan mengalami deflasi 0,32 persen, tetapi secara tahunan melonjak menjadi 9,71 persen dari 1,93 persen pada Desember 2025. BI menjelaskan bahwa lonjakan tahunan tersebut terutama disebabkan *base effect* karena implementasi diskon tarif listrik rumah tangga 50 persen pada Januari–Februari 2025. Artinya, bukan semata-mata karena pemerintah menaikkan tarif baru secara agresif pada 2026, melainkan karena pembandingan tahun lalu terlalu rendah. ([Bank Indonesia](#))

Mekanisme yang sama berlanjut lebih kuat pada Februari 2026. Analisis inflasi BI menyebut bahwa inflasi *administered prices* meningkat signifikan menjadi 12,66 persen secara tahunan. Inilah faktor kunci yang mendorong inflasi IHK Februari 2026 di atas rentang sasaran. Karena itu, membaca lonjakan 4,76 persen tanpa memahami distorsi basis akan menghasilkan analisis yang keliru. Pada hakikatnya, sebagian besar kenaikan tahunan Februari adalah hasil dari “pemantulan statistik” setelah adanya diskon listrik tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa tekanan inflasi Februari 2026 bersifat sementara dan diperkirakan mereda pada Maret, sejalan dengan berkurangnya pengaruh basis tersebut. ([Bank Indonesia](#))

Perkembangan Maret 2026 memperkuat penjelasan itu. Inflasi tahunan *administered prices* turun tajam ke 6,08 persen dari 12,66 persen pada

Februari. Secara bulanan, kelompok ini memang kembali mencatat inflasi 0,31 persen, terutama karena bensin dan tarif angkutan antarkota seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan meningkatnya mobilitas saat Idulfitri. Namun penurunan tajam inflasi tahunan dari Februari ke Maret menunjukkan bahwa sumber tekanan terbesar sebelumnya memang bersifat temporer. Dengan kata lain, Maret adalah bulan konfirmasi bahwa lonjakan Februari bukan awal dari spiral inflasi harga yang diatur pemerintah, melainkan lebih banyak dipengaruhi basis statistik dan musiman transportasi. ([Bank Indonesia](#))

Namun demikian, kelompok *administered prices* tetap tidak boleh diremehkan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan harga yang diatur pemerintah selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, intervensi tarif dapat melindungi daya beli dan menstabilkan harga. Di sisi lain, perubahan tarif listrik, BBM nonsubsidi, angkutan udara, atau angkutan antarkota dapat segera menular ke inflasi. Karena itu, BI dan pemerintah pada Januari 2026 secara eksplisit menekankan perlunya kebijakan *administered prices* yang memperhatikan *timing*, *sequencing*, dan *magnitude* agar stabilitas harga dan daya beli tetap terjaga. Ini menunjukkan bahwa inflasi Indonesia medio 2026 bukan hanya soal pasar, tetapi juga soal desain kebijakan harga administrasi negara. ([Bank Indonesia](#))

Faktor Global dan Nilai Tukar

Walaupun inflasi awal 2026 banyak dipengaruhi faktor domestik, dimensi global tetap penting. Dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan inflasi global meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen, yang mempersempit ruang pelonggaran moneter global dan berpotensi menunda penurunan Fed Funds Rate. BI juga mencatat bahwa pada 18 Februari 2026 rupiah berada di sekitar Rp16.880 per dolar AS, melemah dibanding akhir Januari, dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatnya permintaan valas korporasi domestik. Meskipun BI menilai rupiah masih undervalued dibanding

fundamental, gejala ini menunjukkan bahwa risiko *imported inflation* tetap harus diawasi. ([Bank Indonesia](#))

Namun menariknya, BI tetap menilai *imported inflation* pada awal 2026 relatif terkendali. Ini berarti pelemahan rupiah dan tekanan inflasi global belum sepenuhnya menerjemah menjadi lonjakan harga impor yang menyebar luas ke inflasi inti. Salah satu penjelasannya adalah bahwa inflasi Indonesia pada awal 2026 lebih banyak didorong faktor domestik: efek basis listrik, kenaikan harga emas, musim panen, Ramadan, dan distribusi pangan. Walaupun demikian, prospek harga komoditas global yang meningkat membuat BI mengakui bahwa inflasi 2026 dan 2027 kemungkinan lebih tinggi dibanding prakiraan sebelumnya, walaupun tetap diperkirakan berada dalam kisaran sasaran. Jadi, faktor global belum menjadi pusat masalah saat ini, tetapi dapat menjadi sumber risiko ke depan. ([Bank Indonesia](#))

Bagi Indonesia, jalur global paling relevan terhadap inflasi biasanya melalui energi, pangan, dan nilai tukar. Jika harga energi dunia naik tajam, tekanan dapat muncul baik pada BBM nonsubsidi maupun biaya logistik. Jika harga pangan global naik, impor pangan tertentu bisa menjadi lebih mahal. Jika rupiah melemah lebih dalam, biaya barang impor dan input produksi ikut naik. Karena itu, meskipun inflasi medio 2026 tampak didominasi faktor domestik, ia tetap berada dalam bayang-bayang lingkungan eksternal yang belum sepenuhnya tenang. IMF pun menilai risiko terhadap ekonomi Indonesia condong ke bawah, berasal dari ketegangan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global. ([IMF](#))

Disparitas Regional: Inflasi Indonesia Bukan Angka Tunggal

Salah satu kekhasan inflasi Indonesia adalah adanya variasi yang cukup besar antarwilayah. Pada Januari 2026, inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh sebesar 6,69 persen, sedangkan yang terendah di Lampung sebesar 1,90 persen. Pada Februari 2026, Aceh kembali mencatat inflasi provinsi tertinggi sebesar 6,94 persen, sementara Papua Pegunungan

termasuk yang terendah sebesar 0,63 persen. Pada Maret 2026, Aceh tetap menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,31 persen, sedangkan Lampung menjadi yang terendah sebesar 1,16 persen. Variasi ini memperlihatkan bahwa inflasi nasional 3,48 persen pada Maret sebenarnya adalah rata-rata dari pengalaman harga yang sangat beragam. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perbedaan regional tersebut tidak boleh dibaca hanya sebagai statistik geografis. Ia menunjukkan bahwa struktur pasokan, biaya logistik, ketergantungan antarwilayah, pola konsumsi, dan efektivitas pengendalian harga tidak seragam di seluruh Indonesia. Daerah yang secara geografis lebih terpencil, atau memiliki rantai pasok lebih panjang, atau lebih rentan terhadap gangguan cuaca dan distribusi, cenderung mengalami tekanan harga lebih besar. Karena itu, kebijakan inflasi Indonesia tidak bisa semata sentralistik. Di sinilah peran TPID menjadi krusial: stabilitas harga nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pengendalian harga di daerah. ([Bank Indonesia](#))

Dari sudut kebijakan publik, disparitas regional ini mengajarkan bahwa satu angka inflasi nasional tidak cukup untuk membaca kesejahteraan riil. Inflasi nasional yang tampak terkendali bisa saja menyembunyikan tekanan berat di wilayah tertentu. Sebaliknya, beberapa daerah mungkin menikmati inflasi yang lebih rendah karena kondisi pasokan yang baik. Karena itu, narasi inflasi medio 2026 harus mengakui bahwa Indonesia mengalami inflasi sebagai negara kepulauan yang kompleks, bukan sebagai ekonomi homogen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Respons Kebijakan Moneter

Dalam menghadapi dinamika ini, Bank Indonesia memilih kebijakan yang relatif stabil. Pada Maret 2026, BI mempertahankan BI-Rate di 4,75 persen. BI menilai inflasi IHK 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran $2,5 \pm 1$ persen, meskipun lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya karena prospek harga komoditas global meningkat. Sikap ini penting untuk dibaca. Bila BI menilai lonjakan Februari sepenuhnya berasal dari overheating permintaan,

respons normalnya adalah pengetatan lebih agresif. Fakta bahwa BI mempertahankan suku bunga menunjukkan bahwa bank sentral memandang tekanan inflasi awal 2026 masih cukup banyak bersifat temporer dan sisi penawaran. ([Bank Indonesia](#))

Di sisi lain, BI tetap menjaga nada kebijakan yang waspada. BI terus menekankan stabilisasi nilai tukar rupiah, penjangkaran ekspektasi inflasi, dan perlunya menjaga ruang stabilitas makro. Dalam komunikasi resminya, BI juga mengaitkan pengendalian inflasi dengan stabilitas nilai tukar dan kondisi global. Artinya, meskipun tidak menaikkan suku bunga, BI tidak menganggap inflasi awal 2026 boleh diabaikan. Strategi yang ditempuh adalah kombinasi antara mempertahankan kebijakan moneter yang kredibel, mengelola rupiah, dan membiarkan distorsi temporer dari basis statistik berlalu tanpa overreaction. ([Bank Indonesia](#))

Pendekatan ini cukup sejalan dengan prinsip kebijakan moneter modern. BI sendiri menyebut bahwa kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespons setiap kejutan inflasi temporer yang akan hilang dengan sendirinya. Jika bank sentral bereaksi terlalu keras terhadap tekanan yang berasal dari pasokan sementara, maka biaya penyesuaiannya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa terlalu besar. Dengan demikian, respon BI pada awal 2026 memperlihatkan keseimbangan antara kehati-hatian dan proporsionalitas. ([Bank Indonesia](#))

Respons Fiskal dan Koordinasi Pemerintah

Pengendalian inflasi di Indonesia tidak mungkin mengandalkan Bank Indonesia saja. Pemerintah dan BI pada 30 Januari 2026 menyepakati penguatan sinergi untuk menjaga inflasi 2026 tetap pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen dan inflasi *volatile food* pada kisaran 3,0–5,0 persen. Langkah yang disepakati mencakup menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, memperlancar distribusi, merumuskan kebijakan *administered prices* dengan memperhatikan *timing* dan besaran, memperkuat komunikasi, memperbaiki infrastruktur pascabencana, serta menjaga daya beli melalui diskon transportasi, diskon tarif tol pada periode Ramadan-

Idulfitri, dan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat pada Februari–Maret 2026. Ini menunjukkan bahwa stabilisasi inflasi dipahami sebagai proyek koordinasi nasional, bukan sekadar operasi suku bunga. ([Bank Indonesia](#))

Kementerian Keuangan juga membaca lonjakan awal 2026 sebagai gejala yang perlu dikendalikan tetapi belum bersifat alarmis. Dalam APBN KiTa edisi Februari dan Maret 2026, Kemenkeu mencatat inflasi Januari 2026 sebesar 3,5 persen dan menilai kenaikan terutama dipengaruhi *administered prices* akibat *low base effect* diskon tarif listrik awal 2025, sementara inflasi inti tetap terkendali dan tekanan pada awal tahun masih dapat dikelola. Kemenkeu juga menyatakan bahwa tekanan inflasi Februari 2026 bersifat sementara dan diperkirakan mengalami moderasi pada Maret 2026. Realisasi Maret yang turun ke 3,48 persen mendukung penilaian itu.

Dari sisi fiskal, hal ini penting karena inflasi memengaruhi kredibilitas APBN, kesejahteraan riil, dan efektivitas belanja sosial. Inflasi yang terlalu tinggi akan menggerus daya beli bansos dan meningkatkan tekanan belanja kompensasi. Sebaliknya, inflasi yang terkendali memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga kualitas belanja, mendorong pertumbuhan, dan menahan gejolak sosial. Karena itu, makalah ini menilai bahwa koordinasi inflasi Indonesia pada medio 2026 adalah contoh nyata bagaimana kebijakan moneter, fiskal, pangan, dan logistik saling bertaut. ([kemenkeu.go.id](#))

Dampak terhadap Daya Beli, Dunia Usaha, dan Kebijakan Ekonomi

Dampak inflasi pada rumah tangga sangat bergantung pada struktur pengeluarannya. Inflasi inti yang rendah memang memberi sinyal bahwa tekanan umum pada barang dan jasa nonpangan relatif terbatas. Namun ketika komponen *volatile food* dan *administered prices* naik, kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap merasakan tekanan besar karena porsi belanja mereka lebih besar pada pangan dan transportasi. Inilah alasan mengapa inflasi 4,76 persen pada Februari menjadi isu yang sensitif, meskipun secara teknis banyak dipengaruhi faktor basis. Dari sudut

pengalaman sehari-hari, masyarakat tidak hidup dalam statistik basis; mereka hidup dalam harga ayam, telur, cabai, dan ongkos perjalanan.

([Bank Indonesia](#))

Bagi dunia usaha, gambaran inflasi medio 2026 relatif lebih baik daripada jika inflasi inti juga melonjak tinggi. Inflasi inti yang stabil memberi sinyal bahwa biaya dan permintaan agregat belum berada pada fase yang sulit dikendalikan. Ini membantu menjaga kepastian harga, keputusan investasi, dan perencanaan usaha. Pada saat yang sama, BI-Rate yang tetap 4,75 persen menunjukkan bahwa kondisi moneter tidak diperketat secara agresif. Kombinasi ini membantu ekonomi tetap tumbuh, sejalan dengan penilaian IMF bahwa ekonomi Indonesia tetap menjadi titik terang global dengan inflasi yang diperkirakan tetap nyaman dalam rentang sasaran.

([Bank Indonesia](#))

Dari perspektif kebijakan makro yang lebih luas, inflasi medio 2026 memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki jangkar kebijakan yang cukup kuat. Sasaran inflasi tetap jelas, bank sentral menjaga kredibilitas, pemerintah aktif dalam koordinasi distribusi pangan dan harga administrasi, dan lembaga internasional masih memandang inflasi Indonesia sebagai *well anchored*. Namun kekuatan ini bukan alasan untuk lengah. Jika gangguan pangan berulang, harga komoditas global naik, dan rupiah berada di bawah tekanan yang lebih berat, maka inflasi yang sekarang tampak sementara dapat berubah menjadi lebih persisten. ([Bank Indonesia](#))

Prospek Inflasi Menuju Pertengahan 2026

Karena data resmi baru tersedia sampai Maret 2026, pembahasan prospek menuju pertengahan tahun harus dibedakan dari deskripsi realisasi.

Berdasarkan data Maret dan pandangan resmi BI, terdapat dasar yang cukup kuat untuk memperkirakan bahwa inflasi Indonesia menjelang medio 2026 cenderung lebih moderat dibanding puncak Februari.

Penurunan inflasi tahunan dari 4,76 persen pada Februari ke 3,48 persen pada Maret menunjukkan berkurangnya pengaruh *low base effect*. BI juga

menyatakan secara eksplisit bahwa inflasi 2026 dan 2027 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen. IMF sejalan dengan itu, menilai inflasi Indonesia *well anchored* dan diproyeksikan bergerak menuju titik tengah sasaran. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, prospek moderasi itu bukan tanpa syarat. Ada empat risiko utama. Pertama, risiko pangan. Jika cuaca terganggu, pasokan beras, cabai, bawang, ayam, dan telur dapat kembali menekan *volatile food*. Kedua, risiko harga komoditas global, terutama energi dan emas. Ketiga, risiko nilai tukar akibat volatilitas global yang dapat meningkatkan *imported inflation*. Keempat, risiko kebijakan harga administrasi, misalnya pada BBM nonsubsidi, tarif transportasi, atau penyesuaian harga lain yang diatur negara. BI pada Maret 2026 bahkan mengakui bahwa prospek harga komoditas global yang meningkat membuat prakiraan inflasi 2026 agak lebih tinggi daripada sebelumnya, walau masih dalam sasaran. ([Bank Indonesia](#))

Bila disarikan, maka gambaran inflasi Indonesia menuju medio 2026 dapat dinyatakan dalam tiga kalimat analitis. Pertama, tren dasarnya masih menuju kestabilan, bukan akselerasi inflasi yang terus-menerus. Kedua, jalur menuju kestabilan itu tetap rentan diganggu faktor pangan, energi, dan global. Ketiga, kualitas koordinasi kebijakan akan menentukan apakah inflasi benar-benar kembali nyaman di kisaran sasaran atau hanya sesekali masuk sasaran karena bantuan efek statistik. Dalam pengertian ini, pengendalian inflasi Indonesia medio 2026 adalah ujian bukan hanya atas kebijakan moneter, tetapi juga atas kapasitas negara mengelola penawaran domestik. ([Bank Indonesia](#))

Pembacaan Kritis: Apa Arti Inflasi Medio 2026 bagi Indonesia?

Secara konseptual, inflasi Indonesia medio 2026 memberi pelajaran bahwa angka inflasi tunggal sering menyesatkan bila dipisahkan dari strukturnya. Februari 2026 tampak menakutkan bila hanya dilihat sebagai 4,76 persen. Tetapi ketika dilihat lebih rinci, tekanan utamanya datang dari *administered prices* yang terdistorsi basis, sedangkan inflasi inti masih di kisaran 2,63

persen. Maret 2026 lalu mengonfirmasi bahwa sebagian besar lonjakan itu memang bersifat sementara. Karena itu, literasi kebijakan inflasi di Indonesia perlu bergerak dari budaya "satu angka" ke budaya "membaca komponen". ([Bank Indonesia](#))

Makna kedua adalah bahwa inflasi pangan tetap menjadi titik paling krusial. Selama ini banyak diskusi inflasi terlalu menekankan suku bunga, padahal di Indonesia perbaikan irigasi, logistik, produktivitas pertanian, gudang dingin, pasar induk, interkoneksi antarpulau, dan distribusi justru sangat menentukan. Inflasi medio 2026 mengingatkan kembali bahwa negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada komoditas pangan segar akan selalu menghadapi inflasi sebagai masalah sistem distribusi. Karena itu, pengendalian inflasi di Indonesia pada akhirnya adalah pengendalian ketidaksempurnaan rantai pasok. ([Bank Indonesia](#))

Makna ketiga adalah pentingnya komunikasi kebijakan. Ketika inflasi naik karena *base effect*, pemerintah dan bank sentral harus mampu menjelaskan perbedaannya dengan inflasi yang lahir dari lonjakan harga aktual. Tanpa komunikasi yang baik, rumah tangga dapat kehilangan kepercayaan, dunia usaha menjadi terlalu berhati-hati, dan perdebatan publik menjadi bias. Pada awal 2026, pemerintah dan BI cukup konsisten menekankan bahwa tekanan inflasi bersifat sementara dan akan mereda pada Maret. Penurunan realisasi Maret membuat komunikasi itu terlihat kredibel. Di sini, kredibilitas kebijakan ternyata tidak hanya ditentukan oleh instrumen, tetapi juga oleh kemampuan menjelaskan realitas ekonomi secara jernih. ([Kemenkeu Media](#))

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gambaran inflasi Indonesia medio 2026 adalah gambaran ekonomi yang relatif stabil, tetapi tidak bebas dari guncangan jangka pendek. Inflasi 2025 ditutup pada 2,92 persen, lalu pada awal 2026 bergerak ke 3,55 persen pada Januari, 4,76 persen pada Februari, dan 3,48 persen pada Maret. Kenaikan Februari terutama dipicu oleh *low base effect* diskon tarif listrik 2025,

sementara tekanan pangan dan musiman Ramadan-Idulfitri memperkuat gejala tersebut. Inflasi inti sendiri tetap terkendali, sedangkan *volatile food* dan *administered prices* menjadi pendorong utama volatilitas awal tahun.

([Bank Indonesia](#))

Karena itu, pembacaan yang paling tepat bukanlah bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis inflasi, melainkan bahwa Indonesia sedang mengelola fase normalisasi inflasi dengan sejumlah gangguan temporer. Bank Indonesia tetap mempertahankan BI-Rate pada 4,75 persen, meyakini inflasi 2026–2027 akan berada dalam sasaran, dan pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian harga pangan, distribusi, dan komunikasi kebijakan. IMF juga tetap menilai inflasi Indonesia berada dalam kerangka yang terjangkau baik. Dengan demikian, secara keseluruhan, inflasi Indonesia medio 2026 dapat disebut masih terjaga.

([Bank Indonesia](#))

Tetapi kata “terjaga” tidak boleh diartikan sebagai “selesai”. Inflasi Indonesia tetap rentan terhadap cuaca, logistik, harga energi, nilai tukar, dan kebijakan harga administrasi. Maka tugas kebijakan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka inflasi dalam rentang sasaran, melainkan memperdalam kualitas stabilitas itu sendiri: memperkuat sisi penawaran pangan, memperbaiki distribusi antardaerah, menjaga kredibilitas moneter, dan mengelola ekspektasi publik secara lebih matang. Hanya dengan cara itu, inflasi yang terkendali akan menjadi fondasi pertumbuhan yang benar-benar berkualitas dan dirasakan oleh masyarakat luas. ([Bank Indonesia](#))

Glosarium

Administered prices: Kelompok harga yang perubahannya dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh kebijakan pemerintah, seperti tarif listrik, BBM tertentu, dan tarif transportasi. ([Bank Indonesia](#))

BI-Rate: Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal arah kebijakan moneter. ([Bank Indonesia](#))

Deflasi: Penurunan tingkat harga secara umum dalam periode tertentu. Dalam konteks IHK bulanan, angka negatif menunjukkan penurunan indeks harga dibanding bulan sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ekspektasi inflasi: Perkiraan masyarakat, pelaku usaha, dan pasar mengenai laju inflasi di masa depan, yang dapat memengaruhi perilaku harga dan konsumsi. ([Bank Indonesia](#))

Imported inflation: Tekanan inflasi yang berasal dari luar negeri, misalnya akibat kenaikan harga impor atau pelemahan nilai tukar. ([Bank Indonesia](#))

Inflasi inti: Komponen inflasi yang mencerminkan tekanan fundamental dan relatif lebih stabil, karena telah mengecualikan unsur harga yang sangat bergejolak dan harga yang diatur pemerintah. ([Bank Indonesia](#))

Inflasi month-to-month (mtm): Inflasi yang membandingkan perubahan harga suatu bulan terhadap bulan sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi year-on-year (yoy): Inflasi yang membandingkan harga suatu bulan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi year-to-date (ytd): Inflasi kumulatif sejak awal tahun hingga bulan tertentu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Low base effect: Kenaikan angka pertumbuhan tahunan yang dipengaruhi oleh basis pembanding tahun sebelumnya yang sangat rendah. ([Bank Indonesia](#))

TPIP/TPID: Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah, forum koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Volatile food: Kelompok harga pangan yang sangat mudah bergejolak akibat panen, cuaca, distribusi, dan pola musiman. ([Bank Indonesia](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Februari). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Maret). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 April). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Data inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Target inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 2 Februari). *IHK Januari 2026 mengalami deflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 30 Januari). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga inflasi 2026.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 12 Maret). *Analisis inflasi Februari 2026.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 18 Maret). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 1 April). *Inflasi IHK Maret 2026 tetap terjaga.* ([Bank Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Gambaran inflasi Indonesia medio 2026*

International Monetary Fund. (2026, 21 Januari). *IMF Executive Board concludes 2025 Article IV consultation for Indonesia*. ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release*. ([IMF eLibrary](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, Februari). *APBN KiTa edisi Februari 2026*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 11 Maret). *Konferensi pers APBN KiTa Februari 2026*. ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 11 Maret). *Kinerja APBN awal 2026 tetap solid*. ([kemenkeu.go.id](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 7 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d4b1d7-91a0-839b-8cb9-b5d86c596a23>